

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaritasar, I. P. (2023). Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Hukum untuk Pembangunan Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 528.
- Andi Kavenya Noorhaliza, R. D. (2023). Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. *Jurnal Pendidikan, Seni Sains, dan Sosial Humaniora*, 5.
- Armanda, B. (2024). Parkir Liar dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 479.
- Ayuningsih, I. R. (2023). Mengenal Economic Analysis of Law. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)*.
- Dr. Fajar Sugianto, S. M. (2013). *Economic Analysis Of Law*. Jakarta: Kencana.
- F, I. L. (2025, April 16). Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. *Komunitas Penulisan Hukum FH UMY*, pp. <https://kph.umy.ac.id/menurunnya-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah/>.
- Fitriani, D. R. (2021). Praktek Rent Seeking (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucrazy). *E-Journal Universitas Subang*, 90.
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaissance*, 469.
- Husein, Y. (2019). *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Isyunanda, K. P. (2022). Pemanfaatan Law And Economics Sebagai Metodologi Analisis Hukum Di Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 127.
- Mainake, Y. (2023). Urgensi Pembahasan Ruu Tentang Perampasan Aset. *Jurnal Info Singkat*, 17.
- Meita Sekar Sari, M. Z. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengetahuan Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 311.

Nabila Ihza Nur Muttaqi, S. (2024). Reformulasi Penetapan Sanksi Pidana Denda Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Economic Analysis Of Law. *Tesis Universitas Islam Indonesia*, 28.

Pantoli, Z. (2024). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In Rem. *Journal of Human And Education*, 4.

Pratama, M. I. (2022). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif Economic Analysis of Law). *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 21.

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S. M. (n.d.). Korupsi: Economic Analysis of Law dan Perspektif Implementasi Straftoemeting. *Pusat Analisa Kebijakan Hukum dan Ekonomi*, 1.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S. L. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Riskyanti Juniver Siburian, D. W. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7.

Sabalino, A. I. (2022). Pendekatan Penelitian Hukum. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 3.

Sabrina, A. (2021). Analisis Penggunaan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Di Kelas Iv Sekolah Dasar (Studi Literatur). *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KDM Indonesia.

Saputra, N. P. (2023). Politik Hukum Dan Muatan Pengaturan Dalam Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. *Jurnal Info Singkat*, 3.

Syah, Z. A. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Tri Indah Sakinah, B. S. (2025). Konsep Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Melalui Gugatan In Rem Berdasarkan Pendekatan Economic Analysis of Law. *Jurnal Reformasi Hukum*, 54.

Wilki Angga Lineleyan, A. T. (n.d.). Tinjauan Yuridis Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti. *E-Journal UNSRAT*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28H ayat (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1)

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, Pasal 2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Angka 2

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Tentang Pembuktian Pada Umumnya Bab 1 Pasal 1865

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (3)